



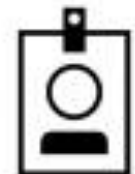
REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Jakarta, 7 Maret 2024

RADEN MURWANTARA
Wakil Ketua III IAI KASP/ Direktur Pengawasan
Bidang Ekonomi dan Keuangan BPKP



Birth:
14 Januari 1971



Work Experiences:

- Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan BPKP (Juli 2022-now)
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo (April 2020-Juni 2022)



Research Experiences:

- Government Support for Enhancing Public Private Partnerships (PPPs) – Comparative Study across 20 European Countries (Ph.D Project)
- BENEFIT HORIZON 2020 EU – An innovative approach by analysing funding scheme of 90 Transport Infrastructure Projects across EU Countries
- COST ACTION TU 1001: Public Private Partnerships: Trends and Theory – Research group of PPPs in Transport Sectors of 24 European Countries
- Collaboration Korean Development Institute (KDI) and BPKP "Does Risk Management Matter in Enhancing Internal Control of Government Institutions? An insight of Indonesia Public Sector Organization"



Publications:

- 3 Journal Q1 (Transport Review, Public Management Review, Research in Transportation Economics)
- 1 Journal Q2 (Journal of Transport and Infrastructure Research)
- 3 chapters in book chapter: "Public Private Partnerships in Transport: Trends and Theory". Rouboutsos, A. (Eds). Routledge Book Series.
- 3 project reports on European Union Collaboration Research Projects
- 1 Working Paper in Economics and Finance, University of Salzburg
- 2 proceeding International Conferences (Den Haag, Netherland and Milan, Italy)
- 3 papers in National Book Chapter and 2 papers in National Journal



Miscellaneous Exp:

- Lead Guest Editor pada Special Issue: "Risk Management in Public Sector Organization" Science Journal of Business and Management, Science Publishing
- External Reviewer "PPP Certification Guidelines" APMG International (The World Bank, ADB, EBRD, IDB, OMIN) funded by PPFIA.
- Wakil Ketua III IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik

Home



Cluster Taman Puspa Blok HO 2 No. 80 Kota Harapan Indah, Bekasi

Educations



- DIII dan D IV Accounting - STAN (Ak.)
- Fakultas Ekonomi-Manajemen (S1), Universitas Terbuka (SE)
- Master of Economic Development, UGM (M.Ec.Dev)
- PhD Public Administration & Management, University of Antwerp, Belgium (PhD)

PhD thesis entitles: "Government Support for Enhancing Public Private Partnerships (PPPs): Comparing, Explaining, and Studying the Effects of Variation Across European Countries"

Professional Certifications



- Chartered Accountant (CA)
- Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)
- Certified Internal Audit Executive (CIAE)
- Certified Risk Governance Profesional (CRGP)
- Certified Government Risk Executive (CGRE)
- Assesor Kompetensi (Askom)

Office:



BPKP Pusat, Jl. Pramuka No. 33
Jakarta

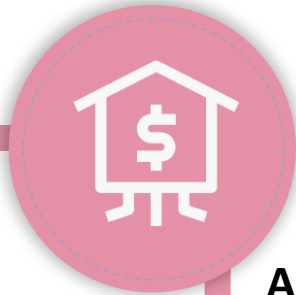


081297239131

murwantarayk@gmail.com

murwantara_soecipto@yahoo.com

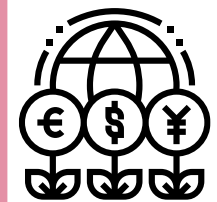
Gambaran Umum Tata Kelola Akuntabilitas Keuangan Negara Tahun 2024



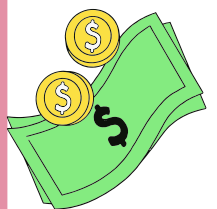
ASUMSI MAKRO TAHUN 2024



Pertumbuhan Ekonomi
5,1-5,7%



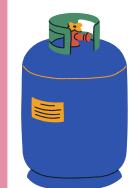
Suku Bunga SBN (10 th)
6,49%-6,91%



Nilai tukar Rp14.700-Rp
15.200/USD



Lifting Minyak Mentah 615-
640 ribu barel/hari



Harga Minyak Mentah USD75-
80/barel

Lifting gas bumi 1,030 ribu-
1,036 ribu Boe/hari

APBN 2024

5,2%

6,7%

15.000/
USD

2,8%

635rb
barrel/hr

82/
USD

1,033 juta
barrel/hr



Arah Kebijakan Fiskal

1. Fungsi Alokasi

Mendukung transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi structural: peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi

2. Fungsi Stabilisasi

Shock absorber terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi

3. Fungsi Distribusi

Mendukung berbagai program afirmasi: penurunan tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem dan stunting



Kebijakan Mobilisasi Pendapatan Negara

1. Reformasi Perpajakan

Perbaikan system perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, & peningkatan kepatuhan wajib pajak

2. Peningkatan Tax Ratio

3. Optimalisasi PNBP

Peningkatan inovasi pelayanan public & mendorong reformasi pengelolaan asset negara



Kebijakan Belanja Negara

1. Jangka Pendek dan Menengah

- Pendek: penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, inflasi, investasi
- Menengah: SDM, infrastruktur, hilirisasi SDA, deregulasi & penguatan institusi

2. Spending Better

- Mendorong efisiensi kebutuhan dasar, focus prioritas Pembangunan, berorientasi hasil

3. Subsidi Tepat sasaran dan Efektifitas Program Perlinsos

- Peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, sinergi program

4. Sinergi dan harmonisasi pusat dan daerah

- Implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiscal regional

5. Arah Efisiensi dan efektifitas Belanja

- Mendorong pemerataan Pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan golongan/wilayah



Kebijakan Pembiayaan

- Kebijakan fiscal ekspansif, terarah dan terukur
- Mengendalikan deficit dan utang dalam batas manageable
- Mendorong efektivitas pembiayaan investasi
- Memperkuat ketahanan fiscal/fiscal buffer
- Mendukung pembiayaan investasi utk memperkuat peran internasional
- Akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM
- Mendorong pembiayaan kreatif dan inovatif/KPBU

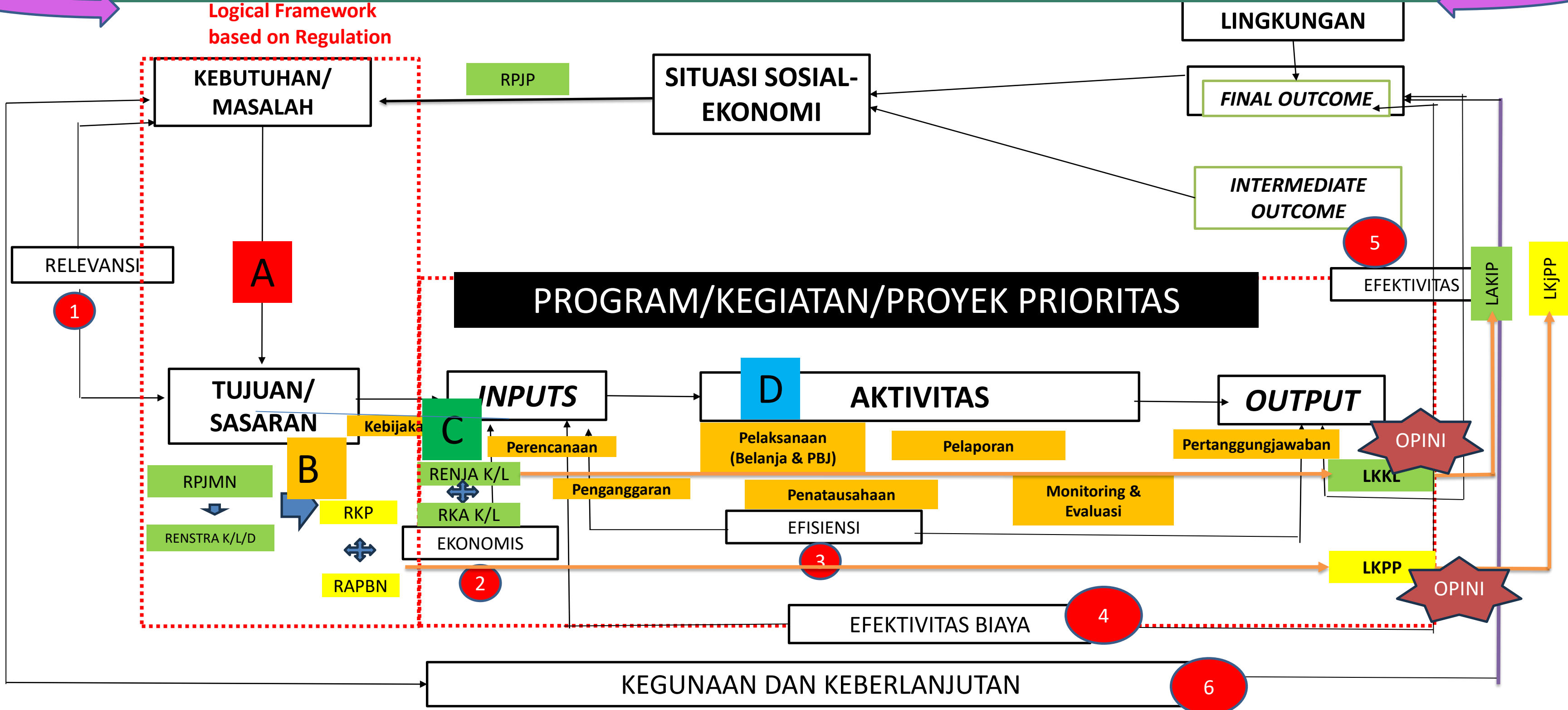
INDIKATOR PEMBANGUNAN

Tingkat Pengangguran 5-5,7%
Kemiskinan 6,5-7,5%
Rasio Gini 0,374-0,377%
IPM 73,99-74,02
NTP 105-108
NTN 107-110



AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

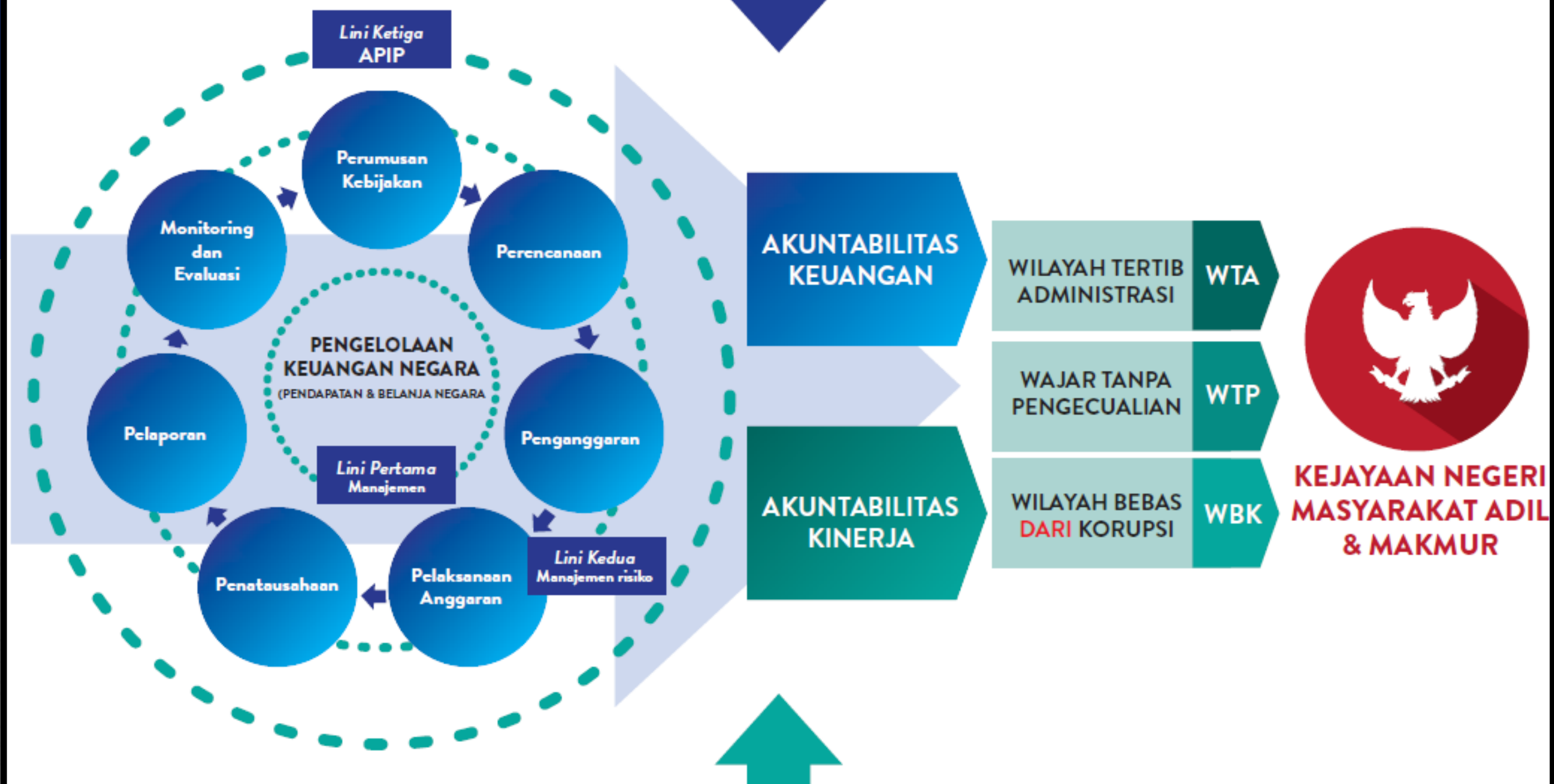


AUDIT, REVIU, MONITORING, EVALUASI

EFEKTIVITAS PERAN APIP

Adaptasi dari *Performance: a conceptual framework*, Pollitt & Bouchaert 2011

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF PADA SELURUH TAHAPAN PROSES PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA



**APARAT PENGAWASAN INTERNAL YANG OPTIMAL
(CONSULTING & ASSURANCE)**

MATURITAS SPIP VS OPINI LK K/L

Capaian Maturitas SPIP K/L Pemda Triwulan II Tahun 2023

Mitra Kerja	Jumlah Instansi Pemerintah	Jumlah Instansi Pemerintah dengan Maturitas SPIP			
		≤Lv-1	Lv-2	≥Lv-3	% ≥Lv-3
K/L	82	1	11	70	85,37
Pemprov	34	-	3	31	91,18
Pemkab/Kota	508	29	157	322	63,39
Jumlah	624	30	171	423	67,79
Persentase	100	4,81	27,40	67,79	

Opini	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	82	85	85	83	81
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	4	2	2	4	1
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1	1	-	-	-
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-

TAHUN 2021

- Level maturitas SPIP level 3 dengan Opini WTP (85,3%)
- Level maturitas SPIP < 3, tetapi dengan Opini WTP (13,4%)
- Level maturitas SPIP Level 3, tetapi dengan Opini WDP (1,3%)

SPIP

MENDUKUNG

PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI



1 KUALITAS PERENCANAAN

- Perencanaan disusun dengan cascading yang baik dengan indikator kinerja dan target yang tepat.
- Perencanaan didukung dengan penganggaran yang efektif dan efisien.



2 KUALITAS STRUKTUR DAN PROSES

- Diperlukan pengendalian atas seluruh penggunaan sumber daya saat melakukan program/kegiatan yang direncanakan.
- Pengendalian yang dibangun dapat merujuk pada 5 unsur SPIP seperti ilustrasi pada slide berikutnya.

MELALUI

Efektivitas dan Efisiensi
Pencapaian Tujuan
Organisasi

Keandalan Pelaporan
Keuangan

Pengamanan atas Aset
Negara

Ketaatan terhadap
Peraturan Perundang-
Undangan

3 KUALITAS PENCAPAIAN TUJUAN

- Opini BPK atas Laporan Keuangan meningkat.
- Tidak terjadi temuan berulang.



1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN

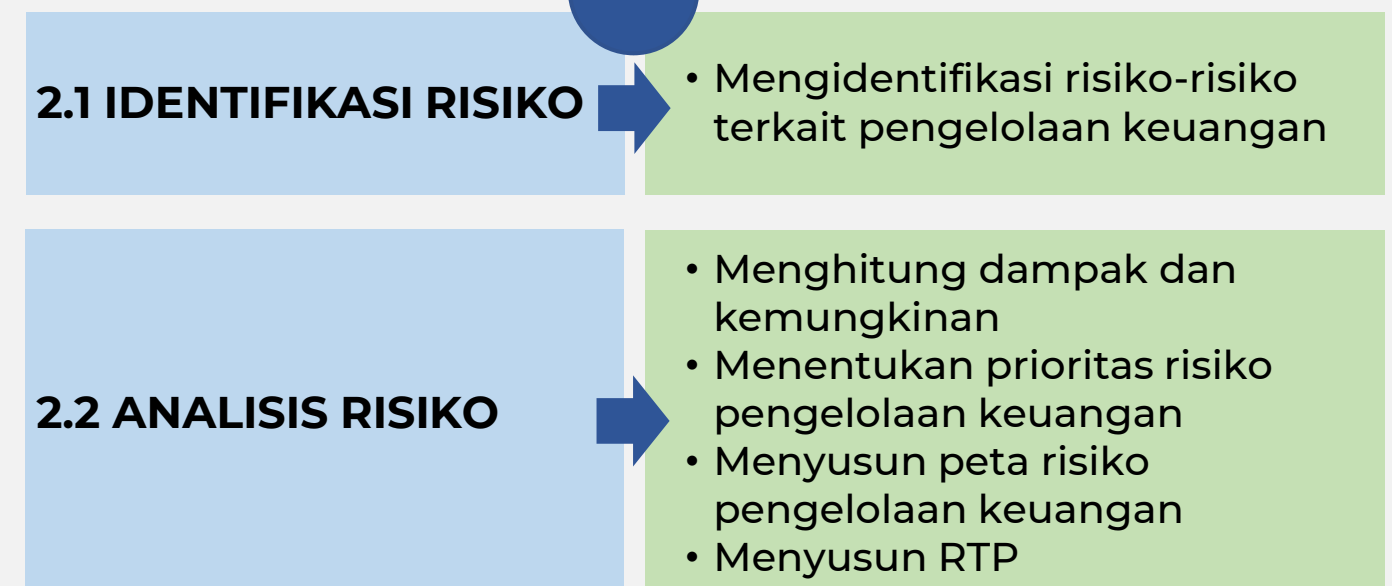


MENINGKATKANNYA OPINI LAPORAN KEUANGAN

ILUSTRASI



2 PENILAIAN RISIKO





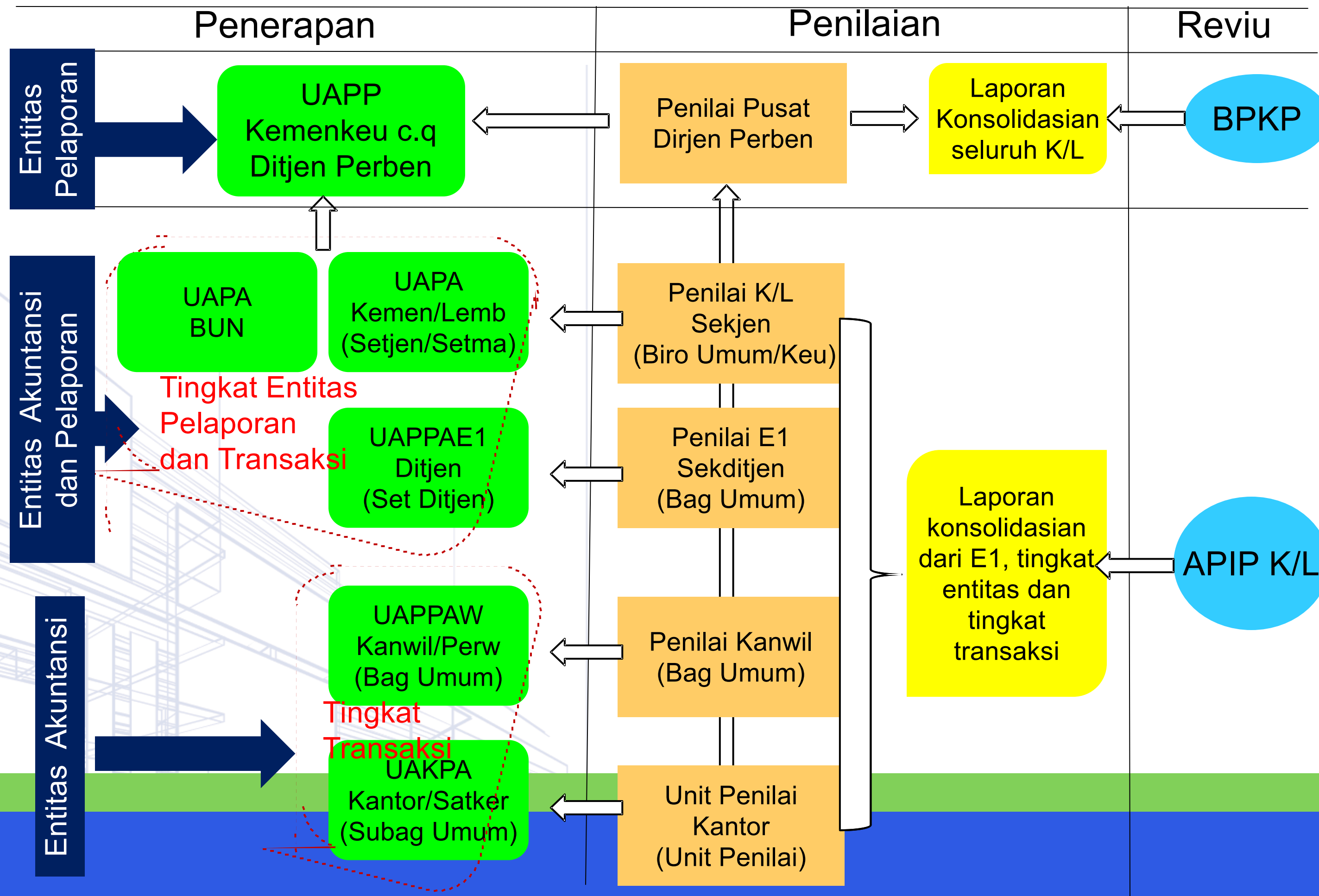


KEBIJAKAN PERUNDANGAN-UNDANGAN REVIU LKPP

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.09/2014 tanggal 15 Januari 2015, tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga



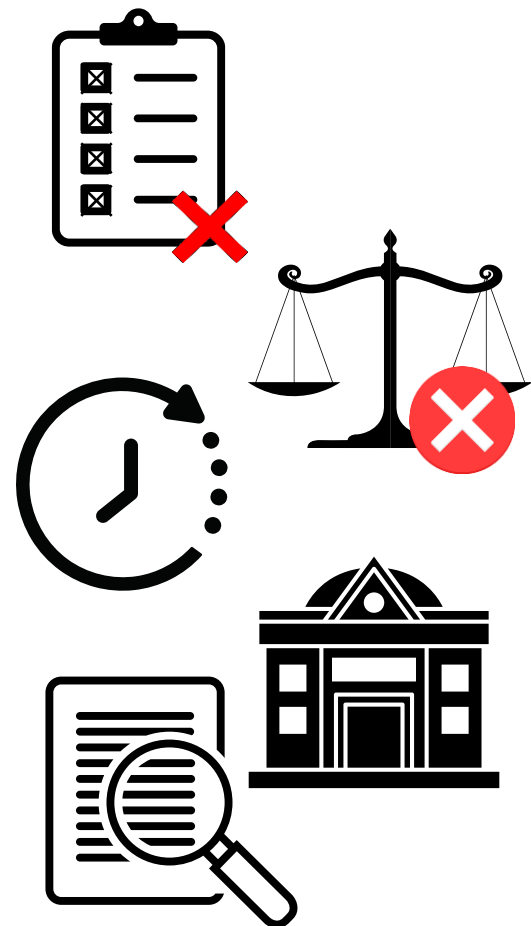
SIKLUS PENERAPAN PMK 17/2019





TUJUAN REVIU

- Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L; dan
- Memberikan keyakinan terbatas kepada Menteri Keuangan mengenai akurasi informasi LKPP serta penyajian dan pengungkapan sesuai dengan SAP; dan membantu terlaksananya konsolidasi dan penyajian LKPP



Untuk mencapai tujuan tersebut, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam proses konsolidasi dan/atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka pereviu menyarankan kepada penyusun LKPP untuk segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan opini sebagaimana dalam audit

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas kesesuaian proses konsolidasi dengan sistem akuntansi pemerintah pusat dan kesesuaian penyajian LKPP dengan SAP.

Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit



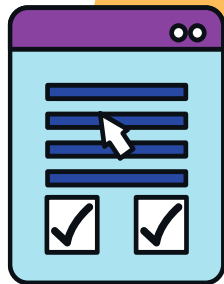
KOMPONEN LK YANG DIREVIU



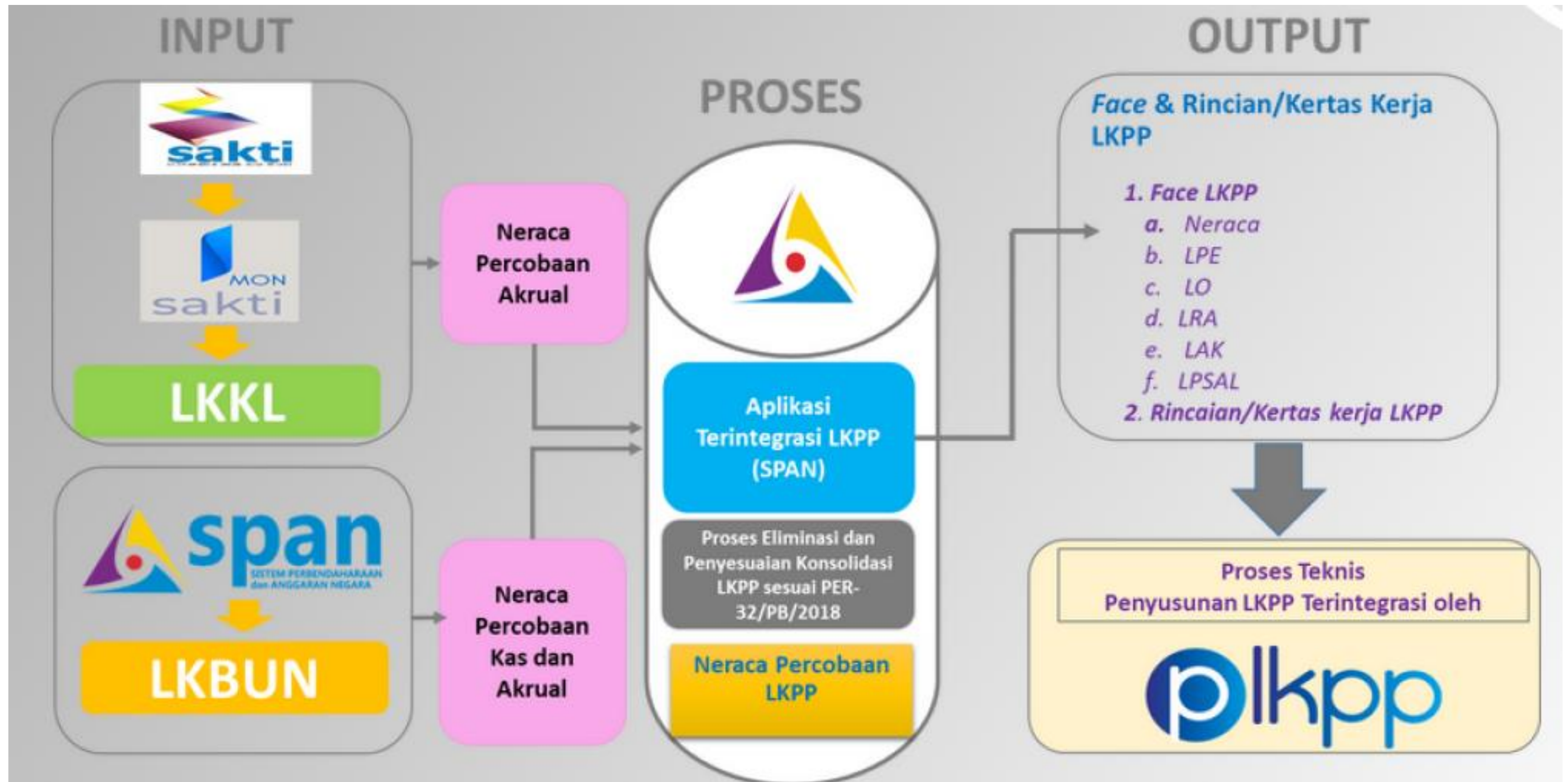
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan
8. Tindak Lanjut BPK
9. Risiko-risiko dari BPK atas Permasalahan signifikan dari hasil audit pada LKKL yang berpotensi menjadi temuan pada LKPP

FOKUS REVIU LKPP

1. Proses penyusunan LK K/L dan permasalahan konsolidasian LKPP
2. Memastikan pencatatan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengklasifikasian sesuai dengan SAP
3. Meyakinkan rekomendasi BPK ditindaklanjuti, dan Langkah mitigasinya untuk mencegah terjadinya kembaali ditahun berjalan
4. Menilai ketepatan langkah penyelesaian untuk tindak lanjut temuan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya agar tidak terulang kembali



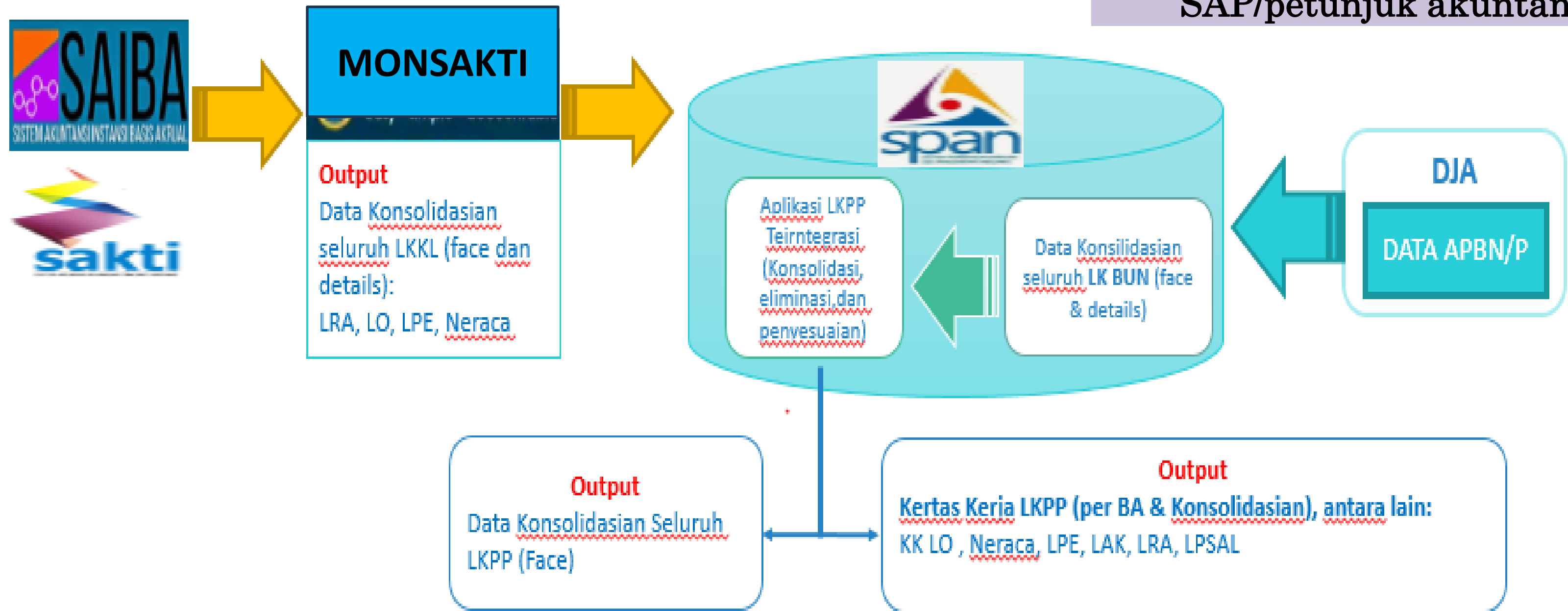
Meyakini Proses/Mekanisme LKPP Terintegrasi sesuai petunjuk teknis penyusunan





Proses/Mekanisme Konsolidasi Data LKPP Terintegrasi

Pos-pos laporan keuangan disajikan sesuai dengan SAP/petunjuk akuntansi





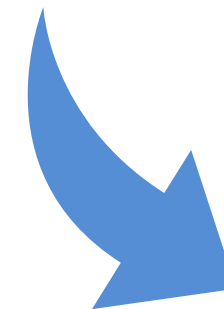
KRITERIA REVIU

Kriteria Umum Opini BPK (Penjelasan Pasal 16 UU No.15/2004)

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosures)
3. Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Meyakinkan angka-angka dan pos neraca sesuai dengan petunjuk akuntansi yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan

- ✓ Pengakuan
- ✓ Pengukuran
- ✓ Pelaporan akun-akun LK
- ✓ Akurasi
- ✓ Keandalan
- ✓ Keabsahan LK





1

Pengumpulan Data/Informasi

Berkaitan dengan konsep dasar reviu yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berjenjang yang meliputi tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E I, UAPP sampai dengan UAPP Konsolidasian, pereviu perlu mempertimbangkan metode pengumpulan data dan/atau informasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan reviu secara optimal.

Pada tahap ini, tim perlu juga membuat surat permintaan username dan password aplikasi SAKTI untuk setiap anggota tim reviu kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan agar dapat mengakses aplikasi SAKTI yang merupakan salah satu sarana untuk pengumpulan data/informasi.

2

Penelaahan Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan

Dalam tahapan ini, pereviu melakukan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan LKPP pada unit penyusun LKPP yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tahap perencanaan reviu. Penelaahan dilaksanakan dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:

- a) Langkah-langkah reviu untuk seluruh akun LKPP;
- b) Langkah-langkah reviu per akun LKPP.

3

Penyusunan Kertas Kerja Reviu

Penyusunan Kertas Kerja Reviu. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan reviu atas LKPP maka pereviu harus menyusun Kertas Kerja Reviu (KKR), untuk menjelaskan mengenai:

- a) Pihak yang melakukan reviu.
- b) Aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LKPP (LRA, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CaLK) yang direviu.
- c) Asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan untuk menilai asersi.
- d) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan/catatan pereviu.

Untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas LKPP, maka KKR yang disusun oleh Anggota Tim (AT) harus direviu oleh Ketua Tim (KT), untuk selanjutnya disetujui oleh Pengendali Teknis (PT) apabila diperlukan. Reviu dan persetujuan atas KKR dibuktikan dengan membubuhkan inisial, paraf/tanda tangan dan tanggal saat KKR tersebut direviu dan disetujui. Penyusunan KKR dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan reviu, KKR harus didokumentasikan dan disimpan dengan baik, untuk kepentingan penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas LKPP berikutnya.

Simpulan dalam KKR dituangkan dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) yang akan menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR).



Langkah Kerja Reviu LKPP

NO	JENIS REVIU	TUJUAN REVIU
1	Temuan Audit tahun Sebelumnya	Mengetahui temuan-temuan BPK atas hasil audit LKPP tahun 2022 dan sebelumnya yang berpotensi menjadi temuan tahun 2023
2	Risiko BPK atas LKPP 2021	Mengetahui potensi-potensi permasalahan yang berasal dari Risiko BPK
3	Reviu Pernyataan Telah Direviu dari APIP	Memastikan bahwa semua Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga telah direviu oleh APIP dan paragraf penjelas dalam catatan hasil reviu telah ditindaklanjuti
4	Reviu Konsolidasi LKKL (melalui MONSAKTI)	
a	Tahap Persiapan	Mendapatkan pemahaman menu-menu di aplikasi MONSAKTI serta mendapatkan bahan-bahan laporan dari aplikasi MONSAKTI
b	Reviu Proses Konsolidasi LKPP	memastikan bahwa semua data KL telah terkonsolidasi, dan angkanya sama
c	Reviu rekonsiliasi K/L di MONSAKTI	memastikan bahwa semua satker telah melakukan rekonsiliasi dengan MONSAKTI
d	Reviu Satker In aktif	Memastikan bahwa saldo satker in aktif telah masuk dalam konsolidasi LK dan LKKL
e	Reviu Penyusutan Satker In Aktif	Memastikan bahwa saldo aset tetap satker in aktif telah dilakukan penyusutan
5	Reviu Kesesuaian dengan SAP	
a	Saldo tidak normal	memastikan bahwa tidak ada saldo tidak normal, baik di level KL maupun konsolidasian. Misal ada aset yang belum diregister, dll
b	Keterkaitan saldo antara Neraca, LPE, LRA, dan LO	memastikan bahwa keterkaitan saldo antara neraca, LAK, LPSAL, LPE, LRA, dan LO telah sesuai dengan seharusnya (misal saldo akhir di LPE harus sama dengan ekuitas di neraca)
c	Suspend Belanja	Mengidentifikasi saldo suspend belanja di akhir periode pelaporan
d	Suspend Pendapatan	Mengidentifikasi saldo suspend pendapatan di akhir periode pelaporan
6	Reviu Persiapan Penyusunan LKPP	Memastikan bahwa penyajian LKKL dan LKBUN sudah lengkap dan disampaikan tepat waktu
7	Reviu Penyusunan LAK LKPP	Memastikan bahwa penyajian LAK LKPP sudah disajikan dengan tepat serta CaLK LAK LKPP telah benar dan pengungkapannya cukup



Langkah Kerja Reviu LKPP

NO	JENIS REVIU	TUJUAN REVIU
8	Reviu Penyusunan LRA LKPP	Memastikan bahwa penerimaan, belanja, dan pembiayaan pada LRA LKPP sudah disajikan dengan benar Memastikan bahwa SILPA/SIKPA pada LRA LKPP sudah disajikan dengan benar Memastikan bahwa CaLK LRA LKPP telah benar dan cukup diungkapkan
9	Reviu Penyusunan LO LKPP	Memastikan bahwa Pendapatan, beban, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa, dan surplus/defisit laporan operasional sudah disajikan dengan benar dan CaLK LO LKPP telah benar dan cukup pengungkapannya
10	Reviu Penyusunan LPE LKPP	Memastikan bahwa Saldo Awal telah menggunakan angka Audited Memastikan bahwa saldo awal LPE, surplus/defisit laporan operasional, saldo akhir, penyesuaian nilai tahun berjalan, dan koreksi yang mempengaruhi ekuitas telah disajikan dengan tepat Memastikan bahwa Transaksi Antar Entitas (TAE) telah disajikan dengan tepat Memastikan bahwa CaLK LPE LKPP telah benar dan cukup diungkapkan
11	Reviu Penyusunan LPSAL LKPP	Memastikan bahwa penyajian akun pada LPSAL telah disajikan dengan tepat, antara lain: - SAL awal dan penyesuaian saldo awal disajikan dengan tepat, - Penggunaan SAL sebagai pembiayaan tahun berjalan disajikan dengan tepat, - SILPA/SIKPA disajikan dengan tepat, - Penyesuaian pembukuan dan penyesuaian lain-lain disajikan dengan tepat Memastikan bahwa CaLK LPSAL LKPP telah benar dan cukup diungkapkan
12	Penyusunan Neraca LKPP	Memastikan bahwa Saldo Awal telah menggunakan angka Audited Memastikan bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas telah disajikan dengan tepat Memastikan bahwa CaLK Neraca LKPP telah benar dan cukup diungkapkan
13	Reviu Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun sebelumnya	Memastikan temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti



Mitigasi Tidak Berulangnya Temuan BPK

Temuan terkait yang perlu diwaspadai
dan sering berulang

- 1 Pengelolaan PNBPNBP
- 2 Pengelolaan Belanja baik barang/jasa
- 3 Pengelolaan dan pencatatan pada aset tetap
- 4 Pengelolaan Piutang



Pengendalian Intern
Atas Pelaporan
Keuangan (PIPK)



Latar Belakang PIPK



Rekomendasi BPK RI (2015) untuk melaksanakan *Control Self Assessment (CSA)*

- Mayoritas K/L belum memahami SPIP terlebih terkait pengendalian intern atas pelaporan keuangan



Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran, KPA, dan Penanggung jawab UAPPA, termasuk Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Pusat, **membuat pernyataan tanggung jawab** atas Laporan Keuangan yang disampaikan.

- PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat



Reviu atas Laporan Keuangan hanya memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan disusun sesuai dengan SAP **dan tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern**

- Lampiran PMK-10/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas LK BUN
- Lampiran PMK-255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas LK K/L



Dasar Hukum, Definisi dan Tujuan PIPK



Dasar Hukum

1. PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. PMK 17/PMK.09/2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Definisi PIPK

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan merupakan pengendalian yang **secara spesifik** dirancang untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tujuan PIPK

Untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan disusun dengan pengendalian intern yang memadai.

PIPK Pada LKPP dan LKBUN diterapkan mulai tahun 2017.

Ketentuan terkait Pelaksanaan Penerapan, Penilaian dan Reviu PIPK

PENERAPAN

- **PIPK diterapkan oleh setiap Entitas** Akuntansi, dan Entitas Pelaporan, termasuk LKPP dan LKBUN
- Bertujuan memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai.

PENILAIAN

- Dalam menjaga efektivitas penerapan PIPK, Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan **melaksanakan Penilaian PIPK**.
- Penilaian PIPK LKPP dan LKBUN dilaksanakan oleh Tim Penilai yaitu **Setditjen Perbendaharaan**.
- **Laporan Hasil Penilaian PIPK** disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

REVIU PIPK

- Untuk memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan **Reviu PIPK**.
- Reviu PIPK LKPP dilaksanakan oleh **BPKP** dan reviu PIPK LKBUN dilaksanakan oleh **Inspektorat Jenderal**.

Kondisi PIPK

sampai dengan saat ini masih banyak KL yang belum melaksanakan PIPK tersebut.

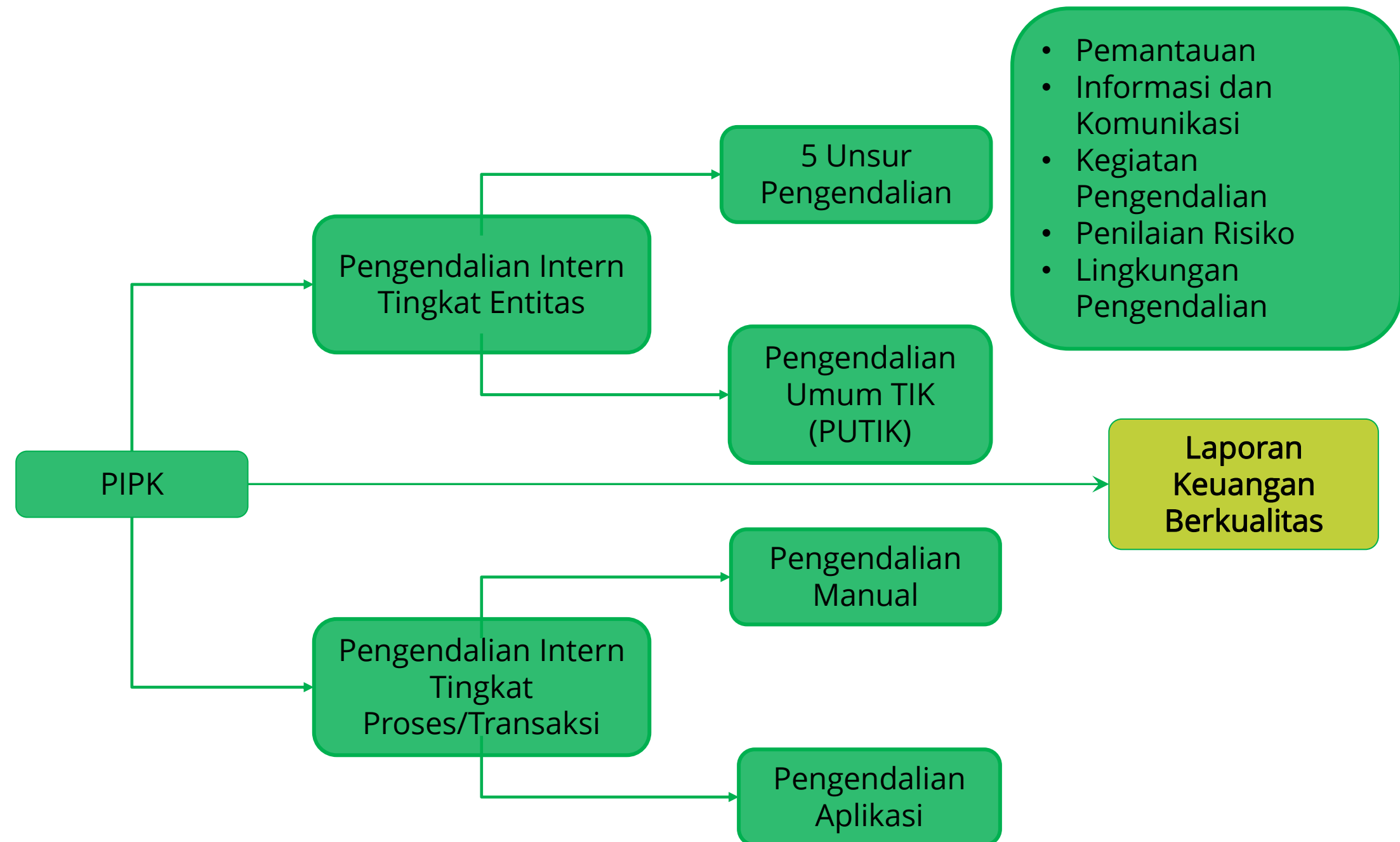
Perlu ada pembinaan kepada Satker/KL agar implementasi PIPK dapat berjalan dengan baik.





Bagan Pelaksanaan PIPK LKPP dan LKBUN

1. PIPK diterapkan oleh setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.
2. Penerapan PIPK tersebut dilaksanakan pada tingkat entitas dan tingkat aktifitas (proses/transaksi).
3. Penerapan PIPK Tingkat Entitas meliputi unsur-unsur pengendalian intern dan penerapan Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK).
4. Penerapan PIPK pada tingkat aktifitas dilakukan terhadap proses/transaksi yang dilakukan secara manual dan/atau proses/transaksi yang dilakukan menggunakan sistem aplikasi.





Kendala dan tantangan yang dihadapi APIP dalam reviu laporan keuangan pemerintah.

- Keterbatasan sumber daya manajemen yang kompeten untuk melakukan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kurangnya pengawasan oleh APIP atas pengelolaan keuangan oleh manajemen
- Kurang optimalnya implementasi PIPK yang dilaksanakan oleh K/L terkait
- ⏪ Menyikapi hal tersebut, agar:
 - ❑ APIP hendaknya diberikan porsi yang lebih banyak dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan baik atas pendapatan maupun belanja
 - ❑ APIP lebih aktif dalam mengawal implementasi pelaksanaan PIPK yang lebih fokus kepada tindak pencegahan temuan berulang





Harapan terhadap pelaksanaan tugas review APIP atas laporan keuangan pemerintah *unaudited*



Peningkatan peran APIP dengan adanya audit intern atau penugasan-penugasan terkait pengelolaan keuangan yang diarahkan langsung ke pokok masalah yang menjadi penyebab temuan-temuan berulang tetap



APIP diharapkan dapat melakukan pemantauan lebih inten atas penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan hasil pemeriksaan




melakukan pengawasan secara langsung penerapan PIPK, mulai saat perencanaan awal, pelaksanaan penilaian dan pelaporan serta melakukan reuiu PIPK-



melakukan komunikasi secara inten dengan pemeriksa BPK dalam memitigasi risiko sehingga tidak sampai terjadi masalah yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan



mempelajari penyebab terjadinya temuan tahun lalu dan temuan tahun2 sebelum sebagai bahan mitigasi risiko agar tidak terjadinya temuan2 terutama pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset tetap

An illustration of two hands shaking, symbolizing collaboration or agreement. The hands are rendered in a simple, cartoonish style with blue and orange sleeves. There are small yellow starburst effects around the hands.

Sinergi dan kolaborasi dengan penyusun laporan keuangan dan auditor laporan keuangan

Pada saat melakukan reviu, perlu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan manajemen pengelola keuangan K/L dan Kementerian Keuangan sebagai BUN dalam hal:

- ✓ Pengajuan user id aplikasi Monsakti dan Omspan
- ✓ Permintaan data laporan keuangan
- ✓ Data dan dokumen tindak lanjut temuan BPK
- ✓ Komunikasi intens dengan manajemen keuangan K/L





TERIMA KASIH

Jakarta, 7 Maret 2024